



## Fungsi Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Penguatan Peran Perempuan di Kelurahan Curug, Depok

**Aloysius Nong Susar**

[Anongurindo@gmail.com](mailto:Anongurindo@gmail.com)

Universitas Indraprasta PGRI

**Ananda Muazizah**

[anandazizah01@gmail.com](mailto:anandazizah01@gmail.com)

Universitas Indraprasta PGRI

**Eka Dinda Avitasari**

[ekadinda2606@gmail.com](mailto:ekadinda2606@gmail.com)

Universitas Indraprasta PGRI

**Sarah Safira**

[safirasarah.611@gmail.com](mailto:safirasarah.611@gmail.com)

Universitas Indraprasta PGRI

**Selvi Anggraeni**

[selvianggraeni2102@gmail.com](mailto:selvianggraeni2102@gmail.com)

Universitas Indraprasta PGRI

**Syifa Najwa Putri**

[syifanajwa192@gmail.com](mailto:syifanajwa192@gmail.com)

Universitas Indraprasta PGRI

**Triandhini Friskhila Nadeak**

[triandhinifris@gmail.com](mailto:triandhinifris@gmail.com)

Universitas Indraprasta PGRI

Alamat: Jl. Raya Tengah No.80, RT.6/RW.1, Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur  
13760

Korespondensi penulis: [Anongurindo@gmail.com](mailto:Anongurindo@gmail.com)

**Abstrak.** *This study aims to analyze the function of the Family Empowerment and Welfare (PKK) organization in strengthening the role of women in RT 07/RW 02, Curug Subdistrict, Cimanggis District, Depok City. The research adopts a qualitative descriptive approach, with data collected through structured interviews with two active PKK administrators. The findings indicate that the PKK plays a significant role in fostering family development and creating spaces for women's participation. However, its effectiveness is still hindered by low community participation, limited training opportunities, a lack of understanding regarding the functions of the PKK, dominance by a small group of individuals, weak task distribution, and minimal cadre regeneration. Despite these challenges, the PKK continues to implement programs such as Posyandu (integrated health service posts) and entrepreneurship training, although with limited support. To optimize the PKK as a driver of women's empowerment, it is necessary to strengthen cadre capacity, broaden community participation, and enhance cross-sectoral support.*

**Keywords:** *Curug Subdistrict; community participation; women's empowerment; PKK.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam penguatan peran perempuan di RT 07/RW 02, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur kepada dua orang pengurus aktif PKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKK berperan penting dalam membina keluarga dan menciptakan ruang partisipasi perempuan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya partisipasi warga, keterbatasan pelatihan, kurangnya pemahaman fungsi PKK, dominasi peran oleh segelintir pihak, lemahnya pembagian tugas, dan minimnya regenerasi kader. Meski demikian, PKK tetap menjalankan program-program seperti

Posyandu dan pelatihan wirausaha dengan dukungan yang terbatas. Untuk mengoptimalkan PKK sebagai pendorong pemberdayaan perempuan, diperlukan peningkatan kapasitas kader, partisipasi masyarakat yang lebih luas, serta dukungan lintas sektor.

**Kata Kunci:** *Kelurahan curug; partisipasi masyarakat; pemberdayaan perempuan, PKK.*

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk fokus pada implementasi pembangunan nasional sebagai upaya menciptakan masyarakat adil dan sejahtera. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 mengenai Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK diamanatkan untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Menurut Shalfiah (2013), PKK mendukung pelaksanaan program pemerintah melalui pendataan berbagai aspek penting, seperti data penduduk, ibu hamil, dan aktivitas masyarakat.

Keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, menjadi indikator kesejahteraan sosial. Menurut Novani Maryam Rambe (2019), keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembentukan kepribadian anak. PKK hadir sebagai wadah strategis untuk menggerakkan partisipasi keluarga dalam pembangunan, dengan perempuan sebagai penggerak (Ramadani, 2020). Gerakan PKK dijalankan oleh Tim Penggerak PKK di semua tingkat pemerintahan dan berakar dari masyarakat desa atau kelurahan (Riska, 2024). Tujuannya mencakup pembentukan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berakhlak. PKK juga bertujuan memberdayakan keluarga agar mandiri dan sadar akan pentingnya kesetaraan gender, hukum, dan kelestarian lingkungan (Mayasari, 2023).

Pemberdayaan keluarga menjadi fokus utama karena keluarga adalah titik awal dalam struktur sosial. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hidup layak sebagai manusia merupakan hak semua individu, dan PKK berperan sebagai fasilitator pemberdayaan perempuan agar turut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Menurut Karmadina et al. (2024), kegiatan wirausaha dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap suami. Namun, banyak perempuan masih berperan pasif dalam pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan konsep pemberdayaan yang membebaskan perempuan dari tekanan sosial dan keterbatasan akses. Tujuannya adalah meningkatkan posisi dan kekuatan tawar (Sekarpuri, dalam Adiba & Jatningsih, 2022), sehingga tercipta keadilan sosial.

Pemberdayaan perempuan bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta peran aktif dalam pembangunan (Eryadini et al., 2021). Namun, hambatan seperti kurangnya keterampilan dan akses sumber daya membuat mereka kurang terlibat dalam ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan digital oleh PKK sangat penting (Syahrany et al., 2025). Di desa, mayoritas perempuan bekerja di sektor informal. Dengan pengetahuan dan keterampilan, mereka dapat mengembangkan diri dan berkontribusi di masyarakat. PKK sebagai mitra pemerintah desa menjadi wadah aktualisasi perempuan (Arisandi, 2015).

Dalam konteks pembangunan nasional, PKK berperan penting dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kualitas sumber daya perempuan. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada perempuan di Kelurahan Curug RT 07/RW 02 tersebut untuk menyalurkan kemampuannya. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kekurangan dari PKK itu sendiri dalam meningkatkan

pemberdayaan perempuan, hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator, antara lain sebagai berikut: (1) kurangnya sosialisasi PKK terhadap program kerjanya kepada masyarakat; terutama kaum perempuan dan generasi mudanya, sehingga masyarakat atau kaum perempuan kurang minat mengikuti PKK; (2) minimnya kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK menyebabkan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan generasi muda, memiliki keterbatasan dalam penguasaan keterampilan, dan (3) rendahnya pemahaman kader PKK terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi kendala tersendiri, sehingga para kader belum mampu secara optimal memanfaatkan teknologi dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan. Meskipun PKK memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program-programnya, seperti kurangnya pemahaman kader terhadap teknologi dan minimnya kegiatan yang diselenggarakan (Muktiono, 2024).

Permasalahan tersebut diduga muncul karena belum berjalannya fungsi organisasi PKK secara optimal dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat topik dalam bentuk penelitian berjudul: “Fungsi Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Penguatan Peran Perempuan Di RT 07/RW 02 Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran PKK dalam meningkatkan penguatan peran perempuan di RT 07/RW 02, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PKK dalam proses penguatan peran perempuan di wilayah tersebut?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh PKK untuk mengatasi berbagai kendala tersebut?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui fungsi PKK dalam meningkatkan penguatan peran perempuan di RT 07/RW 02, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi PKK dalam proses penguatan peran perempuan.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh PKK dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan penguatan peran perempuan di wilayah tersebut.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Fungsi**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi dapat diartikan sebagai manfaat, efektivitas, atau peran yang dijalankan oleh sesuatu. Menurut The Liang Gie (dalam Fista & Parjiyana, 2024, p.6) mengatakan bahwa fungsi merupakan sekumpulan tugas yang memiliki kesamaan atau keterkaitan erat satu sama lain, yang dijalankan oleh seseorang berdasarkan jenis, karakteristik, atau cara pelaksanaannya. Dengan kata lain, fungsi mencerminkan serangkaian aktivitas yang serupa dan saling berhubungan, yang dilaksanakan secara terorganisir oleh individu tertentu dalam suatu peran atau pekerjaan.

Definisi tersebut sejalan dengan pendapat dari (Ilyas, 2021, p.5) yang mengatakan bahwa fungsi merupakan kumpulan aktivitas yang dijalankan oleh individu atau suatu organisasi, yang termasuk dalam kategori yang sama berdasarkan karakteristik, cara pelaksanaan, atau pertimbangan lain yang berkaitan dengan tugas tertentu.

### **2. Pengertian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**

Menurut Parsons (dalam Hermawan, dkk., 2021, p. 192), pemberdayaan merupakan suatu proses di mana individu memperoleh kekuatan yang memadai untuk terlibat dalam

pengendalian dan memberikan pengaruh terhadap berbagai peristiwa serta lembaga yang berdampak pada kehidupannya. Pemberdayaan juga menekankan pentingnya individu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk menentukan arah hidupnya sendiri maupun kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Tauhidi (2021, p.48) mengatakan bahwa Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan bagian dari upaya memperkuat eksistensi individu, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, dan negara dalam tatanan global, yang berlangsung dalam kerangka proses aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Proses ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, pemerintahan, serta keagamaan. Menurut Tim penggerak PKK Pusat (dalam Rita & Sri, 2020, p.306) menyatakan bahwa gerakan PKK merupakan sebuah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang berakar dari inisiatif masyarakat itu sendiri, dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, serta sehat dan sejahtera secara lahir maupun batin.

Tujuan utama Gerakan PKK adalah memberdayakan keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. Sasaran dari gerakan ini adalah terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti baik, sehat dan sejahtera, mandiri, maju, menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender, serta memiliki kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penggerak PKK di tingkat kelurahan memiliki dua fungsi utama, yaitu: (1) sebagai penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar bersedia dan mampu melaksanakan berbagai program PKK; serta (2) sebagai fasilitator yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, membina, dan membimbing jalannya Gerakan PKK. Sebagaimana dikemukakan oleh Puput dan Liliek (2021, hlm. 25), pemberdayaan perempuan bertujuan untuk membentuk perempuan yang mandiri, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada pihak luar, baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pencarian informasi terkait dengan fungsi organisasi PKK dalam penguatan peran perempuan. Penelitian dilakukan di rumah ketua PKK RT 07/RW 02 dengan dua narasumber, yaitu pengurus PKK aktif di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yang dilakukan kepada para pengurus PKK untuk mendapatkan data terkait fungsi PKK di lingkungan tersebut. Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu (Radianza & Mashabai, 2020). Wawancara difokuskan pada aspek sumber daya manusia, pembagian peran, program kerja, dampak kegiatan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKK.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Struktur Organisasi dan Komposisi Pengurus**

Jumlah pengurus aktif PKK di RT 07/RW 02 berjumlah sekitar 15 orang, dengan keterwakilan dari masing-masing RT sebanyak 2–3 orang. Komposisi ini mencerminkan adanya usaha untuk merangkul seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan PKK. Namun, proses pemilihan pengurus dilakukan melalui penunjukkan langsung oleh atasan tanpa

mekanisme musyawarah atau keterlibatan warga secara langsung. Situasi ini mengakibatkan rendahnya rasa kepemilikan dan partisipasi anggota dalam organisasi. Banyak warga yang tidak berminat menjadi pengurus karena menganggap kegiatan PKK sebagai aktivitas sosial tanpa imbalan, sehingga tidak memberikan nilai ekonomi langsung. Kurangnya insentif ekonomi dalam kegiatan sosial seperti PKK adalah salah satu faktor dalam manfaat masyarakat, terutama ketika kegiatan tersebut dianggap sebagai beban tambahan tanpa manfaat langsung (Wahyuni & Candrawati, 2023). Bahkan, sebagian besar keterlibatan bersifat wajib, seperti halnya bagi ibu-ibu yang menjabat sebagai ketua RT.

**2. Kompetensi dan Keterampilan Pengurus**

Pengurus PKK memerlukan bimbingan serta pelatihan guna memperkuat kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Namun, pelaksanaan pelatihan di lingkungan ini masih sangat terbatas. Salah satu kendalanya adalah keterlibatan hanya satu atau dua orang pada setiap RT yang menyebabkan rendahnya antusiasme sebab kurangnya teman diskusi atau dukungan saat mengikuti pelatihan. Selain itu, kurangnya dorongan dari pihak RT dan sesama warga membuat kegiatan PKK sepi partisipasi. Partisipasi masyarakat yang rendah memiliki dampak negatif pada kesenjangan antara kebutuhan lokal dan kebijakan pemerintah. Ini mengarah pada proyek yang tidak terkait, kurangnya dukungan sosial, dan perkembangan rendah (Octaningrum et al., 2024). Tantangan terbesar dalam hal ini adalah perbedaan karakter warga, kurangnya pemahaman terhadap fungsi PKK, dan minimnya kepedulian terhadap kegiatan sosial. Hal ini menjadikan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia belum terlaksana secara maksimal.

**3. Pembagian Tugas dan Implementasinya**

Dalam struktur organisasi PKK, pembagian tugas telah tersusun, namun dalam praktiknya pelaksanaan tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan hanya segelintir pengurus yang benar-benar aktif, sementara sebagian besar lainnya pasif atau hanya terlibat secara formalitas. Akibatnya, beban kerja tidak terbagi merata dan kegiatan PKK hanya dijalankan oleh orang-orang yang sama saja. Persiapan departemen tugas yang jelas mengalirkan tanggung jawab ke setiap anggota organisasi untuk melakukan tugas (Rahmawati & Nugroho, 2018). Situasi ini mencerminkan kurangnya sistem koordinasi dan pengawasan internal yang efektif, sehingga pembagian peran tidak diiringi dengan tanggung jawab yang konsisten dari masing-masing anggota.

**4. Tingkat Partisipasi dan Komitmen**

Tingkat partisipasi pengurus dalam kegiatan seperti arisan, pengajian, dan posyandu menunjukkan pola yang repetitif, yaitu hanya orang-orang tertentu yang aktif secara konsisten. Meskipun ada peningkatan, perubahan ini belum cukup signifikan. Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang pemberdayaan dan interaksi sosial justru menjadi beban bagi sebagian warga. Minimnya rotasi partisipan menyebabkan regenerasi pengurus dan kaderisasi di tubuh PKK sulit dilakukan. Hal ini juga memengaruhi komitmen anggota dalam mengikuti kegiatan karena tidak adanya penyegaran dalam struktur keanggotaan.

**5. Pengembangan SDM dan Akses terhadap Pelatihan**

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pihak kelurahan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan, antara lain mengenai pencegahan stunting dan pembuatan kompos. Namun, dampak dari pelatihan tersebut tidak bersifat berkelanjutan karena kurangnya implementasi dan tanggapan dari masyarakat. Para pengurus merasa usaha yang dilakukan, seperti memberi nasihat kepada warga terkait stunting, sering kali diabaikan. Selain itu, usia mayoritas pengurus yang sudah lanjut menjadi kendala tersendiri dalam

mengakses informasi dan pelatihan berbasis teknologi. Meskipun demikian, mereka tetap menunjukkan semangat untuk berpartisipasi semaksimal mungkin dalam setiap pelatihan yang disediakan.

#### **6. Fokus Program dan Implementasi di Lapangan**

Program unggulan PKK di wilayah ini adalah Posyandu dan Jumantik (Juru Pemantau Jentik). Program ini telah berjalan sejak awal berdirinya PKK, namun pelaksanaannya sempat terhambat. Salah satu kendala utama adalah penolakan sebagian warga terhadap kunjungan rumah untuk keperluan pengasapan (*fogging*), yang merupakan bagian dari program pencegahan DBD. Akibatnya, kegiatan yang awalnya berjalan rutin setiap bulan menjadi terganggu. Selain itu, beberapa inisiatif ekonomi seperti pembuatan keripik juga dijalankan, tetapi skalanya masih kecil dan hasilnya belum mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Program ini lebih bersifat tambahan pemasukan daripada pemberdayaan ekonomi yang menyeluruh.

#### **7. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Program**

Hambatan paling besar dalam pelaksanaan program PKK adalah rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan lingkungan dan sosial. Meskipun pengurus telah melakukan berbagai upaya pendekatan, seperti sosialisasi dan pelatihan, respons masyarakat tetap minim. Keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif warga, dan tanpa adanya perubahan kesadaran kolektif, maka efektivitas PKK akan terus terbatas. Kesadaran masyarakat merupakan faktor kunci yang belum dapat dimobilisasi secara optimal hingga saat ini.

### **KESIMPULAN**

Peran PKK di RT 07/RW 02 Kelurahan Curug sangat penting dalam mendorong keterlibatan perempuan, pembangunan sosial dan pemberdayaan keluarga. Namun, pelaksanaan fungsi organisasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi warga, keterbatasan pelatihan dan kompetensi kader, serta kurangnya pemahaman terhadap fungsi PKK. Masalah internal seperti pembagian tugas yang tidak merata dan dominasi segelintir orang dalam aktivitas juga menghambat efektivitas program. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan sosial dan pemberdayaan menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, pengurus tetap menunjukkan komitmen untuk menjalankan peran mereka, dan program seperti Posyandu serta pelatihan wirausaha telah dijalankan meski dengan dampak yang terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kader, partisipasi warga, serta dukungan lintas sektor sangat diperlukan untuk memperkuat peran PKK sebagai pilar utama dalam menggerakkan pemberdayaan perempuan di tingkat masyarakat lokal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adibah, N., & Jatningsih, O. (2022). PENGUATAN BARGAINING POWER KADER PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) JAWA TIMUR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN PARTAI: Penguatan Bargaining Power Kader Perempuan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(3), 743-757. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n3.p743-757>
- Andini, R., & Praptono, S. (2020). Pelatihan Administrasi PKK RW 06 Di Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 305-308. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.10558>

- Desi, A. (2015). Peran PKK di Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Kalimantan: UNMUL*.
- Tauhidi. (2021). PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ETNIK JAWA MUSLIM DAN ETNIK LAMPUNG MUSLIM DALAM MEMBANGUN HARMONI SOSIAL [Disertasi doktoral, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Program Pascasarjana, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam]. <https://repository.radenintan.ac.id/15841/1/COVER%20BAB%201-2%20SD%20DAFTAR%20PUSTAKA%20TAUHIDI.pdf>
- Eryadini, N., Ratna, N., & Nufus, A. F. (2021). Pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan ekonomi produktif. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(01), 22-26. <http://journal.academiapublication.com/index.php/jers>
- Faiqoh, P., & Desmawati, L. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Batik Sekar Jagad Di Dusun Tanuraksan Desa Gemeksekti Kabupaten Kebumen. *Lifelong Education Journal*, 1(1), 23-34. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i1.17>
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191-198.
- Ilyas, A. V. M. (2021). Fungsi Pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Karmadina, M. H., Tampy, V. V., Jemadu, K. E., Lamabelawa, S., Naen, M. A. L., Daton, M. F. L., ... & Manafe, D. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga melalui Wirausaha Bersama UMKM Perempuan Kasih di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(2), 445-456. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i2.1705>
- Kemenko, P. M. K. (2019). Optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan. *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- Mayasari, P. D. (2023). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Melestarikan Lingkungan Bersih dan Sehat pada Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Muktiono, A. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan PKK di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 53-61. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3094>
- Octaningrum, A., Zuniati, A. R., Aulia, H. N., & Nurdin. (2024). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.228>
- Radianza, J., & Mashabai, I. (2020). ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE SEVEN TOOLS QUALITY DI PT. BORSYA CIPTA COMMUNICA. *JITSA Jurnal Industri & Teknologi Samawa*, 1(1), 17-21.

- Rahmawati, A., & Nugroho, H. (2018). CAPACITY BUILDING PADA UNIT PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK). *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 25–28. <https://doi.org/10.30997/qh.v4i1.1190>
- Ramadani, D. M. (2020). Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 677-690.
- Rambe, N. M. (2019). Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. 3, 930-934. <http://semnasfis.unimed.ac.id>
- Riska Indahni Putri, R. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Shalfiah, R. (2013). Peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program pemerintah kota bontang. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 975-984.
- Syahrany, N. S., Aprilianti, S., & Septianawati, W. (2025). PEMBERDAYAAN IBU PKK DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA DI ERA DIGITAL. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 17-28. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25210>
- Wahyuni, A. A. N. S., & Candrawati, A. A. K. S. (2023). PERAN PKK DALAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MARGA DAUH PURI KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN. *JURNAL BINACIPTA*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.46837/binacipta.v2i1.17>